

# ANALISIS KENAIKAN TARIF AIR PDAM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013

**Teguh Priyo Utomo**  
NIM 125020304111004

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyesuaian tarif air, mekanisme dan perhitungan tarif air, serta untuk mengetahui kontribusi penyesuaian tarif kepada peningkatan pendapatan pada PDAM. Obyek penelitian ini adalah PDAM Kabupaten Lamongan Tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan *single case study*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian tarif air disebabkan karena kenaikan biaya produksi, penghapusan utang, dan peningkatan pelayanan. Mekanisme penyesuaian tarif berdasarkan pada Permendagri nomor 23 Tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan air minum pada perusahaan daerah air minum. Kenaikan tarif dasar sebesar 42% mengakibatkan kenaikan pendapatan penjualan air sebesar 32%.

**Kata kunci:** *PDAM, Tarif Air, Biaya Produksi, Pendapatan.*

## 1. PENDAHULUAN

Semangat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pembangunan masyarakat dengan memegang prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu kondisi dan potensi alam setiap daerah yang berbeda satu sama lain akan memberikan kesempatan yang luas kepada daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kata lain, daerah harus mempunyai sumber daya alam maupun sumber daya lainnya yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang ada di daerah tersebut.

Salah satu sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan adalah sumber daya air. Air merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia. Dalam kesehariannya, manusia membutuhkan air untuk dapat bertahan hidup. Air adalah sumber kehidupan yang dimanfaatkan untuk minum, mengairi tanaman, mandi, mencuci dan aktifitas lainnya. Tanpa air, manusia akan sulit menjalankan kehidupannya. Sumber air tidak selalu ada di setiap daerah. Ada daerah yang mengalami surplus air, namun ada juga daerah yang kekurangan air. Oleh karena itu penggunaan air sudah selayaknya diatur oleh pemerintah mengingat sifatnya yang dibutuhkan sebagai hajat hidup masyarakat dan ketersediaannya

berubah-ubah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa Bumi, Air, Dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan dasar bagi pemerintah bahwa penggunaan air harus dikelola dengan baik dan benar agar memberikan kemakmuran bagi rakyat.

Pemanfaatan sumber daya air salah satunya dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemanfaatan sumber daya air adalah Perusahaan Daerah air Minum (PDAM). PDAM membawa dua misi utama yaitu misi sosial dan misi mencari keuntungan. Dengan membawa misi sosial PDAM harus bisa memberikan pelayanan kebutuhan bagi seluruh masyarakat tak terkecuali juga yang berpenghasilan rendah atau miskin. Misi yang kedua adalah PDAM juga wajib untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang didapatkan dari pelayanan kepada sektor industri agar bisa berpartisipasi terhadap pembangunan melalui kontribusinya kepada Pemerintah Daerah baik secara khusus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun secara umum dengan meningkatkan kualitas hidup sehat bagi masyarakat. Disamping itu PDAM sebagai pengelola air juga harus bisa memberikan pelayanan berupa air minum atau air bersih secara layak sesuai dengan persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas kepada masyarakat.

Sebagian besar modal PDAM dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah banyak memberikan penyertaan modal kepada PDAM sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola otonomi dalam bidang pemanfaatan sumber daya air. Dengan memiliki modal yang relatif besar dari Pemerintah Daerah, PDAM juga diharapkan bisa mendapatkan keuntungan. PDAM harus berada dalam kondisi yang sehat, baik dalam hal keuangan, manajerial, dan personalia untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini berkaitan dengan kontribusi PDAM terhadap APBD melalui pos Pendapatan Asli Daerah – Hasil hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan.

Namun pada kenyataannya, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah kepada APBD melalui Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada pos Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil bila dibandingkan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah yang lain, bahkan beberapa perusahaan menjadi beban Pemerintah Daerah (Devas, 1999:92).

Salah satu hal yang sangat berhubungan dengan masalah keuangan adalah penentuan tarif air. Penentuan tarif air PDAM diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Keadilan dalam pengenaan tarif dilakukan melalui penerapan tarif diferensiasi melalui subsidi silang antar kelompok pelanggan. Dalam hal pemulihan biaya, pendapatan PDAM harus memenuhi pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*). Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif. Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan

dan akuntabel. Perhitungan tarif juga harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.

Kenaikan tarif yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Lamongan termasuk kebijakan yang cukup lama tidak dilakukan oleh PDAM Kabupaten Lamongan. Penyesuaian tarif sebelum tahun 2013 dilakukan pada tahun 2007 yang diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tarif Dasar Rekening Air Minum PDAM Kabupaten Lamongan.

Dengan mengamati kondisi PDAM Kabupaten Lamongan yang telah membuat kebijakan penyesuaian tarif air maka peneliti melakukan penelitian dengan melakukan analisis kenaikan tarif air PDAM Kabupaten Lamongan Tahun 2013. Tujuan penelitian adalah untuk:

1. mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan kenaikan tarif air PDAM Kabupaten Lamongan
2. mengetahui tata cara dan perhitungan penyesuaian tarif air PDAM Kabupaten Lamongan.
3. mengetahui apakah kebijakan kenaikan tarif air PDAM Kabupaten Lamongan memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan perusahaan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Biaya**

Pengertian biaya menurut Supriyono (2000;16) adalah “harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan”. Menurut Mulyadi (2005;8) biaya adalah “pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”.

### **Klasifikasi Biaya**

pengklasifikasian biaya menurut Sulastiningsih dan Zulkifli (1999:85-87) sebagai berikut:

1. Biaya standar dan biaya dianggarkan  
Biaya standar merupakan biaya yang ditentukan di muka (predetermine costs) yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk. Biaya yang dianggarkan merupakan perkiraan biaya total pada tingkat produksi yang direncanakan.
2. Biaya terkendali (controllable costs) dan biaya tidak terkendali (uncontrollable costs)  
Biaya terkendali (controllable costs) merupakan biaya yang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer tertentu. Biaya tidak terkendali (uncontrollable costs) merupakan biaya yang tidak secara langsung dikelola oleh otoritas manajer tertentu.
3. Biaya tetap committed dan discretionary  
Biaya tetap committed merupakan biaya tetap yang timbul dan jumlah maupun pengeluarannya dipengaruhi oleh pihak ketiga dan tidak bias

dikendalikan oleh manajemen. Biaya tetap discretionary merupakan biaya tetap yang jumlahnya dipengaruhi oleh keputusan manajemen.

4. Biaya variabel teknis (engineered variabel cost) dan biaya kebijakan (discretionary variabel cost)

Biaya variabel teknis adalah biaya variabel yang sudah diprogramkan atau distandarkan seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya variabel kebijakan adalah biaya variabel yang tingkat variabilitasnya dipengaruhi kebijakan manajemen.

5. Biaya relevan (relevant cost) dan biaya tidak relevan (irrelevant cost)

Biaya relevan (relevant cost) dalam pembuatan keputusan merupakan biaya yang secara langsung dipengaruhi oleh pemilihan alternatif tindakan oleh manajemen. Biaya tersebut dapat dihindarkan apabila diinginkan. Biaya tidak relevan (irrelevant cost) merupakan biaya yang tidak dipengaruhi oleh keputusan manajemen.

6. Biaya terhindarkan (avoidable costs) dan biaya tidak terhindarkan (unavoidable costs)

Biaya yang terhindarkan adalah biaya yang dapat dihindari dengan diambilnya suatu alternatif keputusan. Biaya tidak terhindarkan adalah biaya yang tidak dapat dihindari pengeluarannya.

7. Biaya diferensial (differential costs) dan biaya marginal (marginal cost)

Pada dasarnya biaya diferensial dan biaya marginal memiliki pengertian yang sama, yaitu tambahan biaya disebabkan keputusan untuk menambah unit yang diproduksi. Namun istilah dan penerapan kedua pengertian tersebut berbeda. Biaya diferensial digunakan oleh akuntan sedangkan biaya marginal dipakai oleh ekonom. Biaya diferensial menurut akuntan dapat diartikan sebagai tambahan total biaya akibat adanya tambahan penjualan sejumlah unit tertentu. Definisi yang lain, biaya diferensial merupakan biaya relevan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan pemilihan alternatif masa yang akan datang (future cost). Biaya marginal menurut ekonom, beranggapan bahwa untuk memaksimalkan laba, produksi harus berada pada tingkat dimana biaya marginal sama dengan penghasilan marginal.

8. Biaya kesempatan (opportunity cost)

Biaya ini merupakan pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu.

### **Penentuan Harga Pokok Produksi**

Menurut Hernanto (1992:45) harga pokok produksi adalah biaya yang dikeluarkan pada saat memproduksi dan melekat pada produknya. Harga pokok produksi terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya selain bahan baku dan tenaga kerja langsung atau disebut biaya *overhead* pabrik.

Penentuan harga pokok produksi secara umum dibagi menjadi dua yaitu:

1. Metode *Full Costing*

Metode *full costing* menurut Samryn (2001,63) adalah “metode penentuan harga pokok yang mempertimbangkan semua biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead tanpa memperhatikan perilakunya”. Metode ini tidak membedakan antara biaya overhead tetap maupun variabel.

Lebih lanjut Rifqi (2014) menjelaskan bahwa “metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap) ditambah dengan biaya non produksi (biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum)”.

## 2. Metode Variabel Costing

Metode *variabel costing* menurut Machfoed (1993,230) adalah “suatu metode penentuan harga pokok dimana biaya produksi variabel saja yang dibebankan sebagai bagian dari harga pokok”.

PDAM Kabupaten Lamongan yaitu menghasilkan air bersih sebagai produk akhir yang dijual kepada pelanggan. Maka dapat dikatakan bahwa karakter produk yang dihasilkan adalah sejenis. Disamping itu, proses produksi air pada PDAM Kabupaten Lamongan juga tergolong merupakan proses produksi yang sederhana, tidak memerlukan tingkat pengolahan yang rumit. Sehingga dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam menghitung harga pokok produksi adalah dengan menggunakan metode *full costing*.

Berdasarkan sifat air yang merupakan barang publik, maka penggunaannya pun harus diatur dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat. Berhubungan dengan hal tersebut pemerintah pun mengatur tentang tata cara pengaturan tarif air minum.

## Harga

Harga merupakan suatu cermin atas apa yang dilakukan perusahaan dalam sebuah produknya. Harga memberikan gambaran kepada masyarakat atau konsumen atas sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Bagi perusahaan, harga merupakan suatu imbal balik atas kepentingan-kepentingan perusahaan dalam mengkonversi produk yang telah dihasilkannya.

Terkait dengan pengertian harga, Kotler (2002:518) menyatakan bahwa “harga ada di sekeliling kita, seperti membayar sewa untuk apartemen, uang kuliah dan uang jasa untuk dokter. Perusahaan penerbangan, kereta api, taxi dan bis mengenakan ongkos, perusahaan pelayanan umum mengenakan tarif, dan bank mengenakan bunga atas uang yang dipinjam”.

Menurut Buchari (2004:169) menyatakan bahwa “harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang”.

Pada Badan Usaha Milik Daerah penggunaan kata harga dapat diidentikkan dengan kata tarif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tarif didefinisikan sebagai

harga satuan jasa, aturan pungutan, daftar bea masuk. Begitu juga PDAM dalam menggunakan harga jual air menggunakan istilah tarif.

### **Tarif PDAM**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), tarif didefinisikan sebagai “kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan”.

Mekanisme penetapan tarif didasarkan atas asas proporsionalitas kepentingan:

1. Masyarakat pelanggan
2. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara, dan
3. Pemerintah Daerah selaku pemilik PDAM.

Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan harus menjamin kepentingan konsumen. Pertimbangan kepentingan PDAM juga harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (full cost recovery), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang (corporate plan) PDAM yang bersangkutan. Pertimbangan lainnya yaitu kepentingan pemilik, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah, pemilik modal atau pemegang saham PDAM dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibahas sebelumnya, penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *single case study*. Pendekatan ini memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari suatu kasus ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat sifat itu dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Penelitian ini menggunakan *single case study* karena penelitian hanya meneliti satu kasus saja, yaitu kebijakan kenaikan tarif PDAM Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini akan menggunakan data Primer dan Sekunder. Penelitian kualitatif mempunyai tipikal tersendiri dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi (gabungan) teknik, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk memperoleh data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2005).

### **4. PEMBAHASAN**

#### **Perkembangan Tarif PDAM**

PDAM Kabupaten Lamongan setiap 5 tahun melakukan peninjauan tarif air minum. Peninjauan tarif air minum tersebut diaplikasikan dengan penyesuaian tarif

air minum pada PDAM Kabupaten Lamongan. Adapun tiga penyesuaian tarif air terakhir yang pernah dilakukan PDAM Kabupaten Lamongan adalah pada tahun 2002, 2007, dan terakhir tahun 2013.

Kenaikan tarif dasar tahun 2002 sampai dengan 2013

No.	Tahun	Tarif Dasar (Rp)	Prosentase Kenaikan
1	2002	900	-
2	2008	1.540	71,11%
3	2009	1.760	14,28%
4	2013	2.500	42,04%

Sumber: Data diolah

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan Tarif Air PDAM Kabupaten Lamongan tahun 2013**

Kenaikan tarif air DAM Kabupaten Lamongan tahun 2013 merupakan suatu hal yang tidak bisa dipungkiri lagi. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penyesuaian tarif air menurut PDAM Kabupaten Lamongan tahun 2013 antara lain:

1. Harga pokok produksi air melebihi harga jual air

Sampai dengan tahun 2012, PDAM Kabupaten Lamongan masih menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2007 tentang tarif dasar rekening air minum PDAM Kabupaten Lamongan dimana tarif dasar sesuai peraturan tersebut adalah sebesar Rp1.760, sedangkan harga pokok produksi mencapai Rp3.200. Dengan kondisi ini, PDAM mengalami kerugian dalam setiap M3 air yang dijual kepada pelanggan. Tingginya tingkat harga pokok produksi terjadi karena kenaikan biaya-biaya operasional perusahaan, seperti kenaikan tarif dasar listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN), harga bahan kimia, dan peralatan.

Sumber listrik PLN digunakan sebagai sumber tenaga pada proses operasional penyediaan air dan kegiatan sehari-hari di kantor. Penggunaan sumber tenaga listrik PLN untuk proses operasional penyediaan air digunakan pada pompa produksi dan pompa distribusi air, baik yang terdapat pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) maupun yang terdapat pada boster pump. Besarnya penggunaan tenaga listrik PLN untuk proses pengolahan air dapat dilihat pada akun beban langsung usaha, yang terdiri dari biaya sumber dan perpompaan, biaya pengolahan air, dan biaya transmisi dan distribusi. Kenaikan tarif dasar listrik PLN tentu saja mengakibatkan kenaikan biaya-biaya tersebut.

Disamping listrik sebagai sumber tenaga pompa-pompa, untuk melakukan pengolahan air dibutuhkan juga bahan kimia sebagai bahan tambahan. Bahan kimia digunakan dalam proses pengolahan agar air yang dihasilkan memenuhi standar kualitas air yang telah ditetapkan oleh departemen kesehatan. Adapun bahan kimia yang digunakan oleh PDAM Kabupaten Lamongan dalam pengolahan air antara lain aluminium sulfat,

cupri sulfat, kaporit bubuk, dukem, dan karbon aktif. Besarnya penggunaan bahan kimia dapat dilihat pada akun beban langsung usaha biaya pengolahan air - biaya bahan kimia.

Sedangkan peralatan digunakan untuk kegiatan pemasangan sambungan baru dan pemeliharaan. Peralatan yang digunakan dalam pemeliharaan mencakup pemeliharaan instalasi, pipa transmisi, pia dinas, water meter, transmisi, distribusi, dan lainnya.

2. Program penghapusan hutang RPD pada Kementerian Keuangan mensyaratkan kenaikan tarif dasar air minum yang dilakukan secara bertahap.

Terkait dengan program penghapusan hutang RPD pada Kementerian Keuangan dicantumkan dalam Bisnis Plan PDAM Kabupaten Lamongan tahun 2012 – 2016 adanya pencapaian target dalam 8 indikator, salah satunya adalah kenaikan tarif dasar air minum yang dilaksanakan secara bertahap.

3. Peningkatan cakupan pelayanan, dengan cara mengembangkan jaringan perpipaan dan penambahan sambungan baru.

Penambahan sambungan baru direncanakan secara bertahap dari tahun 2013 sebanyak 700 sambungan, tahun 2014 sebanyak 2500 sambungan, dan tahun 2015 sebanyak 3000 sambungan.

### **Mekanisme penyesuaian tarif air PDAM Kab Lamongan tahun 2013**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Bab VI mekanisme dan prosedur penetapan tarif, PDAM Kabupaten Lamongan mengusulkan kenaikan tarif dengan berdasar asas proporsionalitas kepentingan pelanggan, PDAM, dan Pemerintah Daerah. Tarif ditetapkan kepala daerah berdasarkan usulan direksi setelah persetujuan dewan pengawas. Konsep usulan penetapan dikonsultasikan lebih dahulu dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan ke kepala daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut proses kenaikan tarif air PDAM Kabupaten Lamongan dimulai pada akhir tahun 2012. Rencana kenaikan tarif air disampaikan melalui surat Direktur PDAM Kabupaten Lamongan nomor 690/568/413.502/2012 kepada Ketua Badan Pengawas PDAM kabupaten Lamongan tentang usulan penyesuaian tarif dasar rekening air tahun 2012.

Disamping mengajukan usulan penyesuaian tarif, Direktur PDAM Kabupaten Lamongan juga membentuk tim penyusunan tarif dasar rekening air minum PDAM Kabupaten Lamongan melalui surat keputusan Direktur PDAM Kabupaten Lamongan Nomor 690/02/413.501/Kep./2013. Tugas tim penyusun tarif adalah menghimpun data dan membuat perhitungan dan menganalisa rencana kenaikan tarif dasar rekening air PDAM Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya dibuatlah surat PDAM Kabupaten Lamongan nomor 690/52/413.502/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal persetujuan penyesuaian tarif



dasar rekening air PDAM Kabupaten Lamongan tahun 2013 kepada Ketua Badan Pengawas.

Pada tanggal 18 Februari 2013, dilaksanakanlah rapat koordinasi untuk membahas rencana kenaikan tarif dasar rekening air PDAM Kabupaten Lamongan tahun 2013, yang dihadiri oleh Badan Pengawas PDAM Kabupaten Lamongan, Direktur PDAM Kabupaten Lamongan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan, Kepala Bagian Bina Pengelolaan BUMD Setda Kabupaten Lamongan, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lamongan, dan staf khusus bidang BUMD. Dalam rapat pembahasan rencana kenaikan tarif tersebut, dihasilkan beberapa hal antara lain:

- Adanya kenaikan tarif dasar listrik PLN untuk tenaga pembangkit di pompa produksi dan pompa distribusi, baik di Instalasi Pengolahan Air (IPA) maupun boster pump, serta kenaikan harga bahan kimia dan peralatan menjadikan biaya operasional bertambah.
- Kondisi kas PDAM Kabupaten Lamongan setiap bulan rata-rata menunjukkan sisa kas yang memprihatinkan dan di sisi lain masih mempunyai kewajiban hutang yang harus dibayar.
- Salah satu penyebab kondisi tersebut adalah belum adanya penyesuaian tarif dasar rekening air PDAM Kabupaten Lamongan, dimana masih menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2007 dengan tarif dasar per M3 sebesar Rp1.760 sedangkan harga pokok produksi sebesar Rp3.200.
- Program penghapusan hutang RPD pada kementerian keuangan yang dicantumkan dalam bisnis plan PDAM Kabupaten Lamongan tahun 2012-2016, mensyaratkan adanya 8 indikator yang salah satunya kenaikan tarif secara bertahap.
- Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Badan Pengawas PDAM Kabupaten Lamongan menyetujui kenaikan tarif dasar rekening air sebesar 42% pada tahun 2013 dengan memperhatikan aspek finansial dan aspek operasional. Aspek finansial mencakup kenaikan kapasitas produksi dan penambahan sambungan baru, kenaikan biaya pegawai, tidak adanya kenaikan tarif sampai dengan tahun 2015, dan menyebutkan kenaikan sebagai penyesuaian terhadap kenaikan tarif listrik selama 5 tahun. Sedangkan aspek operasional mencakup strategi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan melalui penambahan sambungan baru yang direncanakan bertahap dari tahun 2013 sebanyak 700 sambungan, tahun 2014 sebanyak 2500 sambungan, dan tahun 2015 sebanyak 3000 sambungan, menjaga kapasitas produksi secara konsisten, dan memperbaiki kualitas pelayanan dan sumber daya manusia.

Atas pembahasan tersebut, Bupati Lamongan memutuskan untuk menerima usulan kenaikan tarif dasar rekening air minum PDAM Kabupaten Lamongan tahun 2013 melalui Peraturan Bupati Lamongan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar

Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 April 2013.

Setelah diterbitkan peraturan tersebut, pada tanggal 17 April 2013 PDAM Kabupaten Lamongan mulai melakukan sosialisasi kenaikan tarif dasar rekening air minum kepada pelanggan yang diberlakukan mulai bulan Mei 2013.

### **Produksi, Distribusi, dan Penjualan Air**

Pada proses produksi air minum tahun 2013, PDAM Kabupaten Lamongan menggunakan tiga lokasi dengan proses pengolahan yang berbeda. Instalasi pengolahan air Babat yang mengambil air baku dari bengawan solo dan instalasi pengolahan air waduk gondang yang mengambil air baku dari waduk gondang, dan sumur dalam brondong. Dalam proses produksi volume air juga diukur menggunakan meter induk yang disesuaikan dengan instalasi pengolahan air yang ada. Volume produksi air selama tahun 2013 mencapai angka 5.379.183 M<sup>3</sup>, yang terdiri dari IPA babat 4.901.436 M<sup>3</sup>, IPA waduk gondang 204.626 M<sup>3</sup>, dan sumur dalam brondong mencapai 273.121 M<sup>3</sup>. Pengukuran volume air dalam proses produksi berguna untuk mengetahui efisiensi produksi air minum.

Berikut ini disajikan kapasitas terpasang, volume produksi, volume distribusi, volume air terjual, dan kebocoran air selama tahun 2011 sampai dengan 2013:

Kapasitas terpasang, produksi, distribusi, dan penjualan air tahun 2011-2013

Tahun	Volume (M <sup>3</sup> )			
	Kapasitas Terpasang	Produksi	Distribusi	Terjual
2011	10.264.320	4.398.000	3.908.458	2.852.062
2012	9.933.840	4.965.225	4.414.617	3.040.472
2013	10.091.520	5.379.183	4.581.935	3.122.038

Sumber: Data diolah

Dari tabel tersebut diketahui volume produksi, volume distribusi, dan air yang terjual pada PDAM Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan 2013.

Namun apabila dilihat lebih detil, terdapat selisih yang cukup tinggi antara volume produksi dengan volume air terjual. Dalam PDAM, kehilangan air juga diistilahkan sebagai *non revenue water* (NRW). NRW dibagi menjadi 2, yaitu NRW produksi, dan NRW distribusi. NRW produksi adalah selisih antara volume produksi dan volume distribusi. Sedangkan NRW distribusi adalah selisih antara volume distribusi dan volume terjual.

NRW digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan penilaian tingkat kesehatan PDAM menurut Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM). Tingkat kehilangan air terdapat pada aspek operasional yang bertujuan untuk mengukur efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan air. Dalam menghitung tingkat kehilangan air, yang digunakan adalah NRW distribusi. Kehilangan air (NRW distribusi) diukur dengan mengurangi volume air

terdistribusi dengan volume air terjual. Sedangkan NRW total diukur dengan membandingkan antara jumlah NRW produksi dan distribusi dengan volume produksi air. Berikut ditampilkan volume produksi, distribusi, penjualan, dan kehilangan air.

Volume produksi, distribusi, penjualan, dan kebocoran air tahun 2011-2013

Tahun	Volume (M <sup>3</sup> )					% NRW Distribusi	% NRW Total
	Produksi	Distribusi	Terjual	NRW Produksi	NRW Distribusi		
1	2	3	4	5=2-3	6=3-4	7=6/3	8=(5+6)/3
2011	4.398.000	3.908.458	2.852.062	489.542	1.056.396	27 %	35 %
2012	4.965.225	4.414.617	3.040.472	550.608	1.374.145	31 %	39 %
2013	5.379.183	4.581.935	3.122.038	797.248	1.459.897	32 %	42 %

Sumber: Data diolah

Dari tabel tersebut diketahui bahwa NRW produksi maupun NRW distribusi mengalami kenaikan dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Begitu juga prosentase NRW distribusi maupun NRW total juga mengalami kenaikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20/PRT/M/2006 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem penyediaan air minum menyatakan bahwa tingkat kehilangan air standar adalah sebesar 20%. Tingkat kehilangan air yang melebihi 20% merupakan potensi pendapatan PDAM yang hilang, sehingga secara tidak langsung dapat dianggap sebagai kerugian yang ditanggung oleh PDAM.

### Harga Pokok Produksi

Harga pokok produksi (HPP) merupakan suatu tingkat harga yang merepresentasikan nilai barang yang berasal dari komponen-komponen biaya produksi. Salah satu metode dalam penyusunan HPP adalah dengan menggunakan metode *full costing*. Metode *full costing* merupakan metode penentuan harga pokok produksi dengan memperhitungkan seluruh biaya produksi. Metode penentuan HPP dengan pendekatan *full costing* menggunakan komponen biaya antara lain bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead baik tetap maupun variabel dan biaya umum dan administrasi.

Metode *full costing* sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 Tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan air minum pada perusahaan daerah air minum pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya. Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar. Biaya dasar merupakan pembagian antara biaya usaha (seluruh total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan

administrasi) dengan volume air terproduksi dikurangi dengan volume kehilangan air standar. Dengan demikian metode *full costing* diadopsi dan dikenal dengan istilah *full cost recovery* dalam PDAM.

Biaya usaha yang dimaksud adalah keseluruhan biaya yang mencakup biaya sumber dan perpompaan, biaya pengolahan air, dan biaya transmisi dan distribusi, dan biaya umum dan administrasi. Sedangkan kehilangan air standar sebesar 20% dari volume produksi merupakan kehilangan air yang terjadi secara wajar karena kegiatan produksi itu sendiri, seperti pembersihan sedimentasi, pencucian filter, dan lainnya. Kehilangan air standar sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20/PRT/M/2006 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem penyediaan air minum (KSN-SPAM).

Pada PDAM Kabupaten Lamongan biaya usaha dibagi menjadi biaya langsung usaha dan biaya umum dan administrasi. Biaya langsung usaha terdiri dari biaya sumber dan perpompaan, biaya pengolahan air, dan biaya transmisi dan distribusi.

Biaya sumber dan perpompaan terdiri dari biaya pegawai, biaya listrik PLN, biaya pemeliharaan, biaya air baku, biaya penyusutan, dan rupa-rupa operasi.

Biaya pengolahan air terdiri dari biaya pegawai, biaya bahan kimia, biaya listrik PLN, pemeliharaan bangunan dan penyempurnaan tanah, pemeliharaan instalasi pengolahan air, pemeliharaan instalasi pompa, pemeliharaan instalasi lainnya, biaya penyusutan, dan rupa-rupa biaya pengolahan air.

Biaya transmisi dan distribusi terdiri dari biaya listrik PLN, biaya pegawai, biaya bahan bakar, pemeliharaan reservoir dan tangki-tangki, pemeliharaan bangunan dan penyempurnaan tanah, pemeliharaan pipa transmisi, pemeliharaan pipa dinas, pemeliharaan instalasi pompa, pemeliharaan water meter, pemeliharaan transmisi dan distribusi lainnya, biaya penyusutan, dan rupa-rupa biaya operasi. Berikut ini disajikan beban langsung usaha tahun 2011 – 2013.

Beban langsung usaha tahun 2011-2013(dalam rupiah)

Beban Langsung Usaha	2011	%	2012	%	2013	%
Biaya Sumber dan Perpompaan	905.488.478	14%	979.669.144	13%	1.092.832.011	13%
Biaya Pengolahan Air	3.538.046.721	49%	3.555.740.546	49%	4.100.602.986	49%
Biaya Transmisi dan Distribusi	2.819.922.717	38%	2.701.950.737	38%	3.205.341.701	38%
Jumlah Beban Langsung Usaha	7.263.457.916	100%	7.237.360.427	100%	8.398.776.698	100%

Sumber: Data diolah

Sesuai dengan metode *full costing*, biaya-biaya yang terdapat dalam biaya langsung usaha PDAM Kabupaten Lamongan, akan dikonversi menjadi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Adapun biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya *overhead* dapat dilihat pada lampiran 2, yang diringkaskan sesuai tabel berikut ini:

Biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik (dalam rupiah)

Biaya	2011	%	2012	%	2013	%
Bahan Baku	930.836.029	13%	982.412.707	14%	1.146.389.961	14%
Tenaga Kerja Langsung	749.207.872	10%	820.025.978	11%	976.513.868	12%
Overhead Pabrik	5.583.414.015	77%	5.434.759.832	75%	6.275.742.869	75%
Jumlah	7.263.457.916	100%	7.237.198.517	100%	8.398.646.698	100%

Sumber: Data diolah

Biaya umum dan administrasi terdiri dari biaya pegawai, biaya kantor, biaya hubungan langganan, biaya penelitian dan pengembangan, biaya keuangan, biaya pemeliharaan, biaya penyisihan/penagihan piutang, biaya rupa-rupa umum, dan biaya penyusutan dan amortisasi.

Berikut disajikan keseluruhan biaya usaha penyusun HPP dengan menggunakan metode *full costing* pada PDAM Kabupaten Lamongan dari tahun 2011 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

Biaya usaha (dalam Rupiah)

Biaya Usaha	Tahun					
	2011	%	2012	%	2013	%
Bahan Baku	930.836.029	8%	982.412.707	9%	1.146.389.961	9%
Tenaga Kerja Langsung	749.207.872	7%	820.025.978	7%	976.513.868	8%
Overhead Pabrik	5.583.414.015	49%	5.434.759.832	49%	6.275.742.869	49%
Biaya Umum dan Administrasi	4.046.438.669	36%	3.850.256.085	35%	4.379.654.937	34%
Total Biaya Usaha	11.309.896.585	100%	11.087.616.512	100%	12.778.431.635	100%

Sumber: Data diolah

Dari tabel tersebut diatas, diketahui bahwa total biaya usaha dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami kenaikan. Proporsi biaya bahan baku berkisar antara 8% - 9% dari total biaya usaha. Proporsi biaya tenaga kerja langsung berkisar antara 7% - 8% dari total biaya usaha. Proporsi biaya *overhead* adalah 49% dari total biaya usaha. Proporsi biaya umum dan administrasi mendominasi total biaya usaha yaitu berkisar antara 34% - 36% dari biaya usaha.

Selanjutnya disajikan perhitungan harga pokok produksi air pada PDAM Kabupaten Lamongan dari tahun 2011 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

Tahun	Biaya usaha (Rp)	Volume Produksi (M <sup>3</sup> )	Kehilangan air standar (M <sup>3</sup> )	Harga Pokok Produksi Air (Rp)
2011	11.309.896.585	4.398.000	879.600	3.214
2012	11.087.616.512	4.965.225	993.045	2.791
2013	12.778.431.635	5.379.183	1.075.837	2.969

Sumber: Data diolah

Dari perhitungan harga pokok air tersebut maka dapat diketahui bahwa HPP air per M<sup>3</sup> pada PDAM Kabupaten Lamongan berfluktuasi yaitu mengalami

penurunan dari tahun 2011 sebesar Rp3.214 menjadi sebesar Rp2.791 pada tahun 2012. Hal ini terjadi karena penurunan total biaya usaha dan kenaikan volume produksi. Sedangkan pada tahun 2012 ke tahun 2013 HPP air mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp2.969 karena terjadi kenaikan total biaya produksi yang diikuti kenaikan volume produksi.

### **Perbandingan Harga Pokok Produksi dan Tarif Rata-Rata**

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 Tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan air minum pada perusahaan daerah air minum, pada pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar atau harga pokok produksi.

Tarif rata-rata merupakan pembagian antara total pendapatan tarif dengan total volume air terjual. Untuk mengetahui apakah pemulihan biaya penuh sudah dicapai atau belum maka harus dibandingkan antara tarif rata-rata dengan harga pokok produksi.

Berikut ini disajikan perhitungan tarif rata-rata yang dibandingkan dengan harga pokok produksi dari tahun 2011 sampai dengan 2013.

Tarif rata-rata tahun 2011-2013

Tahun	Pendapatan Air (Rp)	Volume Terjual (M <sup>3</sup> )	Tarif Rata-rata (Rp)	HPP (Rp)	Selisih (Rp)
2011	7.774.341.072	2.852.062	2.726	3.214	(489)
2012	8.648.035.070	3.040.472	2.844	2.791	53
2013	11.465.541.100	3.122.038	3.672	2.969	703

Sumber: PDAM Lamongan (diolah)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa pada tahun 2011 tarif rata-rata lebih rendah daripada harga pokok produksi sebesar Rp489 sehingga dapat diketahui bahwa *full cost recovery* belum tercapai. Dengan kata lain PDAM Kabupaten Lamongan pada tahun 2011 mengalami kerugian dari setiap M<sup>3</sup> air yang dijual kepada pelanggan sebesar selisih antara tarif rata-rata dengan harga pokok produksi tersebut. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 tarif rata-rata lebih tinggi daripada harga pokok produksi sebesar Rp53, dan Rp 703 sehingga dapat diartikan *ful cost recovery* telah tercapai atau PDAM seharusnya mendapatkan keuntungan dari setiap M<sup>3</sup> air yang dijual kepada pelanggan.

### **Penyesuaian Tarif PDAM Kabupaten Lamongan 2013 dan Konsistensi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 Tahun 2006**

Perhitungan penyesuaian tarif PDAM Kabupaten Lamongan tahun 2013 berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 Tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan air minum pada perusahaan daerah air minum pada pasal 14 yang menyatakan bahwa untuk perhitungan dan proyeksi biaya dijadikan acuan dalam penetapan tarif. Sesuai dengan peraturan tersebut, maka PDAM Kabupaten

Lamongan melaksanakan perhitungan proyeksi biaya dasar, biaya usaha, dan volume air terproduksi yang digunakan sebagai dasar perhitungan tarif air minum.

Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, kemungkinan efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta sumber pendanaannya. Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi, dan pengembangan usaha baru.

Adapun perhitungan proyeksi biaya dasar yang telah dilakukan PDAM Kabupaten Lamongan seperti tabel berikut ini:

Perhitungan tarif dasar untuk kenaikan tarif tahun 2013

No.	Uraian	Sat	2012	2013
1	Historis/Proyeksi volume produksi	M <sup>3</sup>	4,965,225	5,076,000
2	Historis/Proyeksi volume produksi - standar kehilangan air (1 - (20%x 1))	M <sup>3</sup>	3,972,180	4,060,800
3	Biaya Usaha diluar biaya bunga dan depresiasi	Rp	8,883,236,552.42	9,505,063,111.09
4	Historis/Proyeksi bunga pinjaman dan denda	Rp	534,172,792.88	851,442,235.26
5	Historis/Proyeksi pembayaran pinjaman (pokok)/Depresiasi	Rp	1,882,340,633.43	1,978,518,857.10
6	Historis/Proyeksi total biaya usaha (3+4+5)	Rp	11,299,749,978.73	12,335,024,203.45
7	Proyeksi Tarif Dasar (6/2)	Rp	2,844.72	3,037.58
8	Kebijakan Tarif dasar 2013 (7x 82%)	Rp		2,490

Sumber: Data diolah

Dalam pembahasan penyesuaian tarif PDAM Kabupaten Lamongan tarif dasar (TD) yang dihitung dari proyeksi biaya usaha dan proyeksi volume produksi air dinilai terlalu tinggi, sehingga disepakati kebijakan kenaikan tarif dasar untuk tahun 2013 hanya sebesar 82% dari proyeksi tarif dasar yang diperhitungkan. Kebijakan tarif dasar tahun 2013 sebesar 82% dari proyeksi tarif dasar adalah sebesar Rp2.490,- yang dibulatkan menjadi Rp2.500,.

Dari tarif dasar yang telah diketahui tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan tarif rendah dan tarif penuh dengan rumusan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tarif rendah (TR)} &= 75 \% \times \text{tarif dasar} \\ &= 75 \% \times 2.490 = \text{Rp}1.870 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tarif penuh (TP)} &= 200\% \times \text{tarif dasar} \\ &= 200\% \times 2.490 = 4.970 \end{aligned}$$

Dari tarif dasar, tarif rendah, dan tarif penuh tersebut, PDAM Kabupaten Lamongan memformulasikan besaran tarif pada masing-masing kelompok dan blok konsumsi sebagai berikut:

Perhitungan tarif air minum dari tarif dasar

Kelompok	Dasar pengenaan tarif			Persentase dari tarif dasar		
	0-10 M <sup>3</sup>	10-20 M <sup>3</sup>	>20 M <sup>3</sup>	0-10 M <sup>3</sup>	10-20 M <sup>3</sup>	>20 M <sup>3</sup>
Kelompok I Sosial Umum	TR	TR	TD	75%	87%	100%
Sosial Khusus	TR	TR	TR	62%	75%	87%
Kelompok II Rumah Tangga I	TD	TP	TP	100%	136%	159%
Rumah Tangga II	TP	TP	TP	112%	153%	179%
Instansi Pemerintah	TP	TP	TP	145%	169%	179%
Kelompok III Niaga Kecil	TP	TP	TP	136%	159%	169%
Niaga Besar	TP	TP	TP	189%	189%	199%
Kelompok IV Industri Kecil	TP	TP	TP	145%	169%	179%
Industri Besar	TP	TP	TP	189%	189%	200%

Sumber: Data diolah

Pembagian tarif berdasarkan kelompok dan blok konsumsi tersebut merupakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 Tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada perusahaan daerah air minum pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa prinsip keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antara kelompok pelanggan.

Disamping itu, sesuai dengan pasal 3 ayat (2) peraturan tersebut menyatakan bahwa prinsip keterjangkauan tarif dicapai apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% dari pendapatan masyarakat pelanggan yang berpatokan pada upah minimum provinsi. Upah Minimum Provinsi untuk Kabupaten Lamongan tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2103 untuk Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp1.075.700,00. Perhitungan tarif dasar sesuai dengan prinsip keterjangkauan adalah sebagai berikut:

#### Perhitungan keterjangkauan tarif air tahun 2013

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Standar kebutuhan pokok air minum	M <sup>3</sup> /KK/Bulan	10
2	Tarif Dasar 2013 per M <sup>3</sup>	Rp	2.500
3	Biaya administrasi & pemeliharaan / bulan	Rp	10.000
4	Pengeluaran untuk standar kebutuhan air minum [(1X2)+3]	Rp	35.000
5	4% dari UMP (1.075.700 X 4%)	Rp	43.028

Sumber: Data diolah



Dari perhitungan tersebut, diketahui bahwa pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum di Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp35.000,00 sedangkan 4% dari upah minimum Propinsi Jawa Timur untuk kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp43.028, sehingga tarif yang ditetapkan tersebut masih terjangkau oleh masyarakat.

Pada dasarnya PDAM Kabupaten Lamongan secara umum telah konsisten menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 Tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada perusahaan daerah air minum. Namun berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai PDAM yang menjadi tim penyusunan tarif dasar rekening air tahun 2013 diketahui bahwa terdapat data pendukung yang belum dipenuhi terkait penyesuaian tarif tahun 2013 yaitu belum dilakukannya kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

### **Kontribusi Kenaikan Tarif Air terhadap Pendapatan Perusahaan**

Pendapatan usaha PDAM Kabupaten Lamongan terdiri dari pendapatan air dan pendapatan non air. Pendapatan penjualan air terdiri dari harga air dan pendapatan jasa administrasi/pemeliharaan. Sedangkan pendapatan non air meliputi pendapatan sambungan baru, pendapatan penyambungan kembali, pendapatan denda, pendapatan pendaftaran, pendapatan balik nama, dan pendapatan penggantian meter rusak.

Adapun pendapatan PDAM Kabupaten Lamongan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2103 adalah sebagai berikut:

Pendapatan PDAM tahun 2011 - 2013 (dalam rupiah)

Uraian	2011	2012	2013	% Kenaikan 2011-2012	% Kenaikan 2012-2013
Pendapatan penjualan air	7.774.341.072	8.648.035.070	11.465.541.100	11,24 %	32,58%
Pendapatan non air	481.115.045	491.365.861	1.554.317.560	2.13%	216,33%
Jumlah Pendapatan Usaha	8.255.456.117	9.139.400.931	13.019.858.660	10,71%	42,46%

Pendapatan air dan pendapatan non air tahun 2011-2013

Dari tabel tersebut diketahui bahwa total pendapatan usaha PDAM Kabupaten Lamongan sebelum kenaikan tarif, yaitu dari tahun 2011 ke tahun 2012, mengalami peningkatan sebesar 10,71%. Sedangkan setelah kenaikan tarif air, dari tahun 2012 ke tahun 2013, mengalami peningkatan sebesar 42,46%. Sedangkan secara spesifik pada pendapatan penjualan air menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan sebelum kenaikan tarif, tahun 2011-2012, menunjukkan tingkat kenaikan sebesar 11,24% dan setelah penyesuaian tarif, tahun 2012-2013, menunjukkan tingkat kenaikan sebesar 32,58%.

### **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan tarif PDAM Kabupaten Lamongan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut a) untuk menutupi biaya-biaya yang menjadi bagian dari harga pokok produksi yang sebelumnya tidak dapat dicukupi dengan tarif yang ada saat itu, b) program penghapusan hutang RPD pada Kementerian Keuangan mensyaratkan kenaikan tarif dasar air minum yang dilakukan secara bertahap, dan c) peningkatan cakupan pelayanan, dengan cara mengembangkan jaringan perpipaan dan penambahan sambungan baru.
2. Dalam melaksanakan penyesuaian tarif air, PDAM Kabupaten Lamongan secara umum telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 Tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada perusahaan daerah air minum, terutama dalam menjalankan prinsip keterjangkauan dan keadilan yang dapat dilihat dari keterjangkauan tarif air minum bagi masyarakat untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sebesar Rp 35.000,- masih di bawah 4% dari upah minimum Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Lamongan yaitu sebesar Rp 43.028,-. Prinsip pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), dicapai dari perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan harga pokok produksi. Prinsip efisiensi pemakaian air dapat dilihat dari pembebanan tarif progresif untuk penggunaan 0-10 M3 10-20 M3, dan lebih dari 20 M3. Prinsip transparan dan akuntabel dilaksanakan PDAM Kabupaten Lamongan dengan melaksanakan pembahasan penyesuaian tarif dengan badan pengawas PDAM Kabupaten Lamongan.
3. Dengan adanya penyesuaian tarif air PDAM Kabupaten Lamongan pada tahun 2013 dengan tingkat kenaikan tarif dasar dari Rp1.760 menjadi Rp 2.500 atau sebesar 42% berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan penjualan air dari Rp8.648.035.070 menjadi Rp11.465.541.100 atau sebesar 32,58%.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Buchari, Alma. 2004. *Manajemen pemasaran dan pemasaran jasa*. Alfabeta, Bandung.
- Devas, Nick., Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly, 1999. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, terjemahan oleh Masri Maris, Jakarta: UI-Press.
- Hernanto. 1992. *Pengantar Akuntansi Biaya*. Jakarta: Erlangga
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran*. Jilid I. Edisi Indonesia. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran*. Jilid II. Edisi Indonesia. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Machfoedz, Mas'ud. 1993. *Akuntansi Manajemen*. Buku Satu. Edisi IV. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: BPFU-Universitas Gajah Mada.
- Mulyadi. 2005. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN

- Rifqi, Muhammad Anshar Hawari. (2014), eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, Analisis Full Costing dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi pada Usaha Moulding Karya Mukti Samarinda, Universitas Mulawarman
- Samryn, LM. 2001. *Akuntansi Manajerial Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta
- Sulastiningsih, Zulkifli. 1999. *Akuntansi Biaya: Dilengkapi dengan Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Supriyono. 2000. *Akuntansi Biaya*. Buku I. Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE
- \_\_\_\_\_.Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tarif Dasar Rekening Air Minum PDAM Kabupaten Lamongan